

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sektor Pariwisata memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas), dampak kepariwisataan terhadap PDB nasional di tahun 2014 sebesar 12,05 miliar dolar AS atau sekitar 9% dari PDB nasional. World Travel & Tourism Council memproyeksi bahwa PDB pariwisata Indonesia akan tumbuh rata-rata 6,9% per tahun hingga 2022, lebih tinggi jika dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan dunia yang hanya 4,2%. Pariwisata juga merupakan pencipta devisa yang tinggi. Kenaikan ini bersumber dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang dan peningkatan rata-rata pengeluaran wisman selama di Indonesia.

Selain itu pariwisata merupakan pilar pembangunan nasional. Melalui sektor pariwisata, Pemerintah mampu berperan meningkatkan penerimaan devisa, pajak, maupun pengentasan kemiskinan. Walaupun dalam praktiknya selama ini masalah kemiskinan pada setiap daerah wisata masih cukup tinggi. Kendati demikian, pembangunan pariwisata dapat meningkatkan perekonomian suatu negara dikarenakan sektor ini memberikan peluang dalam pergerakan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Dampak krisis ekonomi yang pernah dialami Indonesia pada 1998-1999, dan juga saat ini secara global terjadi krisis ekonomi,

mendorong negara-negara di beberapa belahan dunia untuk memprioritaskan pembangunan pada sektor pariwisata sebagai upaya pemulihan ekonomi negaranya.

Pengembangan potensi pariwisata oleh pemerintah Indonesia sendiri memiliki target sasaran pembangunan pariwisata untuk tahun 2019. Berdasarkan laporan kinerja Kementrian Pariwisata Republik Indonesia tahun 2017 bahwa sektor pariwisata nasional dapat menyumbang 9,2 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional pada tahun 2019. Selanjutnya berkaitan dengan kunjungan wisatawan mancanegara ditargetkan hingga 20 Juta yang pada tahun 2017 hanya menargetkan 15 Juta. Untuk wisatawan nusantara sendiri target pemerintah berkenaan dengan pengeluaran (spending money) dari wisatawan nusantara ditargetkan meningkat dari sebelumnya 223, 25 Triliun Rupiah pada tahun 2017, maka pada tahun 2019 berjumlah 275 Triliun Rupiah. Hal ini juga dibarengi dengan capaian pemerintah pada tahun 2017, penerimaan devisa sebesar 182 Triliun dari Wisatawan Mancanegara. Jika melihat dari realisasi tahun sebelumnya dan target pemerintah secara nasional terhadap pengembangan sektor pariwisata, maka pemerintah daerah juga mesti membca peluang ini untuk menambahkan pendapatan daerah dari kontribusi sektor pariwisata.

Saat ini sektor pariwisata menjadi semakin penting karena selain mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, pariwisata tidak memerlukan negara menjual sumber daya alam berupa mineral dan juga

minyak serta gas yang tidak bisa diperbaharui. Tumpuan utama pembangunan pariwisata adalah membangun suatu kawasan yang menjadi destinasi wisata dengan mengandalkan pada potensi keindahan sumber daya alami yang berkelanjutan. Destinasi wisata yang mengandalkan keindahan sumber daya alam tersebut diantaranya adalah kawasan pantai, kawasan pegunungan, danau, serta pulau. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menggalakkan pariwisata adalah dengan mewujudkan seperangkat peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga keaslian keindahan sumber daya alami agar tidak dirusak oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Salah satu Undang-undang yang melindungi kelestarian wilayah pesisir dan kepulauan adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sektor pariwisata di Kabupaten Bintan menjadi salah satu lapangan usaha yang menyerap jumlah tenaga kerja terbesar. Jumlah tenaga kerja tersebut tersebar bekerja di hotel serta restoran yang dikelola oleh pengusaha perhotelan yang sebagian besar adalah merupakan perusahaan asing. Sampai dengan Tahun 2015 berdasarkan data BPS, angka penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha pariwisata yang terdiri dari restoran, hotel, dan perdagangan mencapai 25,09 % dari seluruh lapangan usaha yang mempekerjakan penduduk usia 15 tahun keatas. Begitu juga jika dilihat kontribusi sector ekonomi penyediaan akomodasi serta makan dan minum dari data BPS tercatat memberikan

kontribusi laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu 13,17% pada tahun 2015.

Kabupaten Bintan adalah salah satu pemerintah daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai lokomotif penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut diawali dengan pengembangan konsep Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE) yang di kelola oleh PT. Bintan Resort Cakrawala sebagai pihak yang diberikan konsensi untuk mengelola kawasan Lagoi menjadi Kawasan Wisata. Kerjasama pengembangan kawasan wisata ini sudah dimulai sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2004. Kawasan Wisata Lagoi Bintan diresmikan pada 18 Juli 1996 oleh Presiden Soeharto (Indonesia) dan Perdana Menteri Goh Chok Tong (Singapura) sebagai salah satu agenda kerjasama Indonesia-Singapura dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi. Sebelumnya, ketika Kabupaten Bintan masih bagian dari provinsi Riau, pada tanggal 28 Agustus 1990, dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura dalam perjanjian Framework Agreement on Regional Economic Cooperation). Hal ini ditambah lagi dengan potensi Free Trade Zone dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai berlaku pada tahun 2016 bahwa Kabupaten Bintan dapat diandalkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri kelautan dan pariwisata alam sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan 2016- 2021.

Dalam mewujudkan Visi Bintang Gemilang 2025 yang menitikberatkan kepada bidang pariwisata maka sisi pembangunan kepariwisataan pemerintah daerah Kabupaten Bintang mesti memperhatikan peluang dan potensi sektor utama yaitu pariwisata dengan mengarahkan pembangunan kepariwisataan maritime secara berkelanjutan. Berdasarkan Visi tersebut maka jelas bahwa ketercapaian visi tersebut telah tertuang didalam misi yang pertama dan berkaitan penting terhadap optimalisasi kemaritiman dibidang pariwisata yaitu: Mengembangkan dan mengoptimalkan potensi kelautan dan pariwisata secara berkelanjutan sebagai daya dukung dan daya ungkit pembangunan daerah. Oleh sebab itu wajar jika Kabupaten Bintang yang memiliki luas wilayah 98% terbesar adalah lautan dengan 2% darat sudah seharusnya mulai melirik pengembangan kepariwisataan yang berbasis pada sektor bahari.

Sangat rasional jika pengembangan pariwisata Kabupaten Bintang dikembangkan sejalan dengan Visi Pemerintah pusat yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Bahkan pemerintah pusat menegaskan bahwa pengembangan potensi wisata bahari memiliki arti strategis dalam pengembangan budaya bahari, usaha multisektor, ekonomi daerah, dan penguatan peran serta masyarakat. Hal ini ditambah lagi bahwa wisata bahari merupakan salah satu program unggulan dan prioritas dalam pembangunan kepariwisataan nasional dengan arah pengembangan yang terdiri dari: pengenalan tempat tujuan wisata, dukungan bagi kampanye pelestarian lingkungan, dan

peningkatan wisata budaya bahari. Namun demikian diperlukan kesamaan persepsi didalam melihat potensi sumber daya alam berupa pengembangan ekonomi kelautan dan ekonomi maritime yang menjadi modal pula didalam pembangunan paradigma pembangunan pariwisata bahari di Indonesia dan daerah pada khususnya.

Ada tiga alasan pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik lokal, regional maupun lingkup nasional (Rahmi, K. (2017) Pertama adalah kepentingan ekonomi daerah, pembukaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Kedua untuk pelestarian dan pengembangan objek wisata. Dan ketiga dengan pariwisata akan membuka wawasan masyarakat setempat untuk dapat mengetahui tingkah laku orang lain yang datang berkunjung, terutama bagi masyarakat setempat demi meningkatkan pola pikir kemajuan pada suatu daerah. Oleh sebab itu jika Pemerintah daerah ingin memanfaatkan pengembangan pariwisata maka mesti mengintegrasikan ketiga hal tersebut didalam perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah.

Untuk wisata bahari sendiri p ekowisata berbasis pada kelautan, maka pengembangannya adalah ekonomi kelautan. Sedangkan jika pengembangan diarahkan pada industri dan perdagangan yang berkaitan dengan laut, maka pengembangan ekonomi maritime yang menjadi fokusnya. Atau dengan kata lain, ekonomi kelautan memiliki konten laut beserta isinya, sedangkan ekonomi maritime berkaitan

dengan industri dan perdagangan yang memanfaatkan laut dan fokusnya berada di permukaan laut.

Kabupaten Bintan terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Bahkan di Kabupaten Bintan beberapa pulaunya merupakan pulau terluar yang langsung berbatasan dengan negara tetangga. Pulau terluar tersebut adalah Pulau Sentut, dan Pulau Mapur. Pulau Mapur saat ini menjadi salah satu tempat kunjungan wisatawan yang berasal dari Tiongkok untuk menikmati wisata pantai berpasir putih dan juga melakukan snorkeling serta melihat penyu-penyu bertelur. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa potensi ekonomi kelautan di Kabupaten Bintan cukup besar dengan karakteristik geografisnya yang memang masuk dalam kategori daerah kepulauan.

Adapun serangkaian langkah-langkah yang diadopsi adalah dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui konsep pariwisata berbasis masyarakat. Hal yang mendasari perlunya pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan sendiri adalah belum sepenuhnya pemanfaatan potensi destinasi wisata tergarap oleh sektor swasta maupun pemerintah daerah sendiri. Selain itu juga adalah bagaimana dengan keterlibatan masyarakat didalam pariwisata daerah dapat menjadi agenda strategis didalam proses transformasi struktural

ekonomi diKabupaten Bintan dengan mendorong serta penguatan peran partisipatif masyarakat ekonomi kerakyatan berbasis pariwisata. Adanya peran serta kelompok masyarakat ini dapat membantu pemerintah secara langsung mengidentifikasi potensi wisata didaerah, kerja simbiosis mutualisme ini dilangsungkan akan menguntungkan masyarakat dan pemerintah daerah.

Titik fokus pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Bintan berdasarkan potensi disektor maritim memberikan gambaran secara umum untuk arah kebijakan pariwisata daerah. Bersandar pada kondisi geografis diatas dan alokasi perencanaan tata ruang wilayah maka potensi bahari-maritim mesti secara khusus mendapatkan perhatian untuk perencanaan, pengembangan dan keberlanjutan pariwisata berbasis masyarakat. Kendati demikian tantangannya adalah bagaimana pemerintah daerah kemudian merekonstruksi agenda strategis tersebut menjadi arah kebijakan secara simultan dan bekerjasama dengan masyarakat yang akan menjadi salah satu actor utama didalam proses implementasi CBT berbasis maritim tersebut.

Namun pada saat ini jika melihat pada kondisi eksisting pola pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau CBT belum sehegemoni seperti dibeberapa daerah lainnya di Indonesia. Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak pada sektor pariwisata belum terkoordinasi sepenuhnya dengan pemerintah daerah untuk kemudian diatur dan diberdayakan untuk pengembangan pariwisata berbasis



masyarakat yang lebih maksimal. Selain itu jika dilihat secara umum tantangan pariwisata jika dilihat dari paparan Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Investasi Pariwisata (BDIP) Kementerian Pariwisata yang disampaikan pada RAKORNAS KEMENPAR 27 Januari 2016 secara jelas menyampaikan bahwa wisata bahari (Marine Tourism) merupakan portofolio produk wisata alam yang ada di Indonesia. Selain itu juga arah pengembangannya meliputi kewilayahan, atraksi, aksesibilitas, amenities, masyarakat dan investasi.

Untuk dapat mengelola dengan baik potensi pariwisata yang masuk dalam sektor bahari, maka diperlukan sebuah strategi yang tepat agar pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pariwisata bisa memenuhi kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan sebuah kajian untuk menyusun sebuah Strategi Pengembangan Kepariwisata Kemaritiman Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bintan.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Proyeksi pembangunan kedepan di Kabupaten Bintan khususnya sektor pariwisata sebagai sektor unggulan daerah perlu dilakukan secara terencana, sistematis dan berkesinambungan. Oleh karena itu pengembangan model pariwisata berbasis masyarakat sebagai instrument inovasi pengembangan kepariwisataan daerah terutama berorientasi wisata bahari mesti diselaraskan guna percepatan pembangunan

pariwisata serta peran partisipatif masyarakat didukung oleh stakeholder di daerah.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan pada bagian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah didalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan destinasi wisata sebagai potensi sumberdaya lokal berorientasi bahari yang belum teroptimalkan guna percepatan pembangunan pariwisata daerah di Kabupaten Bintan.
2. Masih belum adanya regulasi penetapan area atau kawasan wisata berbasis masyarakat di daerah Kabupaten Bintan.
3. Kondisi kelembagaan masyarakat lokal dalam mengurus pariwisata berbasis masyarakat / CBT yang terkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bintan serta pengakomodiran kelompok atau komunitas wisata yang secara swadaya diinisiasi oleh masyarakat sehingga perlu ada strategi untuk pengembangan dan *capacity building* (Peningkatan Kapasitas) kelembagaan CBT guna mendorong pemanfaatan pariwisata daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan awal diatas maka adapun rumusan masalah kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja potensi wisata berbasis bahari di Kabupaten Bintan?
2. Bagaimana perencanaan pengelolaan potensi wisata berbasis bahari Kabupaten Bintan?
3. Bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Bintan dalam pengembangan potensi wisata berbasis bahari?
4. Bagaimana kebijakan pariwisata daerah terhadap pengembangan wisata bahari?
5. Bagaimana kebijakan pariwisata daerah terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat?
6. Kondisi lingkungan apa yang memicu terbentuknya pariwisata berbasis masyarakat?
7. Bagaimana rumusan model pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan

### **1.4. Maksud dan Tujuan**

#### **1.4.1. Maksud Kegiatan**

Adapun maksud dari kegiatan ini adalah:

1. Mengeksplorasi potensi sumber daya kepariwisataan bahari di Kabupaten Bintan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;

2. Menganalisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pengembangan kepariwisataan kelautan dan kemaritiman Di Kabupaten Bintan yang berbasis Masyarakat;
3. Menyusun strategi pengembangan kepariwisataan kelautan dan kemaritiman berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan;
4. Merumuskan kebijakan strategis dalam pengembangan kepariwisataan kelautan dan kemaritiman berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan yang berkelanjutan.
5. Mengeksplorasi potensi sumber daya kepariwisataan bahari di Kabupaten Bintan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
6. Menganalisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pengembangan kepariwisataan kelautan dan kemaritiman Di Kabupaten Bintan yang berbasis Masyarakat;
7. Menyusun strategi pengembangan kepariwisataan kelautan dan kemaritiman berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan;
8. Merumuskan kebijakan strategis dalam pengembangan kepariwisataan kelautan dan kemaritiman berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan yang berkelanjutan.

#### **1.4.2. Tujuan Kegiatan**

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Terpetakannya potensi sumber daya Pariwisata berbasis Bahari di Kabupaten Bintan yang potensial dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bintan yang berbasis masyarakat;
2. Teridentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan
3. Tersusunnya sebuah strategi pengembangan kepariwisataan bahari berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan;
4. Tersusunnya rekomendasi kebijakan pengembangan kepariwisataan bahari berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan.

## **1.5. Sasaran dan Manfaat**

### **1.5.1. Sasaran Kegiatan**

Adapun sasaran dari kegiatan ini akan menjadi pedoman atau arahan keterpaduan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bintan yang digunakan sebagai acuan bagi seluruh instansi/lembaga, dunia usaha dan masyarakat khususnya dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan bahari. Selanjutnya secara spesifik diharapkan sasaran dari kegiatan kajian ini adalah:

1. Tersedianya kajian pengembangan kepariwisataan bahari yang berbasis masyarakat untuk di Kabupaten Bintan;
2. Tersedianya kebijakan strategi pengembangan kepariwisataan bahari berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan.

### **1.5.2. Manfaat**

Disamping sasaran dari dari kegiatan, adapun manfaat kajian pengembangan kepariwisataan kelautan dan kemaritiman berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan ini adalah:

1. Kajian potensi sumberdaya alam kelautan dan kemaritiman yang mendukung pengembangan sector pariwisata di Kabupaten Bintan.
2. Kajian ini akan dapat menganalisis potensi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman yang dimiliki oleh Kabupaten Bintan;
3. Kajian ini menyajikan pilihan strategi dalam pengembangan kepariwisataan kelautan dan kemaritiman berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan;
4. Kajian ini memberikan pilihan kebijakan strategis dalam pengembangan kepariwisataan kelautan dan kemaritiman berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Identifikasi Masalah
- 1.3 Rumusan Masalah
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sasaran dan Manfaat
- 1.6 Sistematika Penulisan

### **BAB 2 TINJAUAN TEORITIS**

- 2.1 Konsep Pariwisata
- 2.2 Wisata Berdasarkan Jenis
- 2.3 Perencanaan Pariwisata
- 2.4 Pembangunan Pariwisata
- 2.5 Daya Tarik Wisata
- 2.6 Potensi Wisata
- 2.7 Potensi Ekonomi Kelautan (Marine Economy)
- 2.8 Potensi Ekonomi Kemaritiman
- 2.9 Konsep Pariwisata Bahari
- 2.10 Pariwisata Berbasis Masyarakat
- 2.11 Potensi Ekonomi Berbasis Masyarakat (Prinsip Partisipasi Masyarakat)
- 2.12 Konsep Manajemen Strategik
- 2.13 Kerangka Berpikir Penelitian

### **BAB 3 METODE DAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

- 3.1 Metode dan Jenis Penelitian
- 3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian
- 3.3 Tenaga Ahli Penelitian

### **BAB 4 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

- 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bintan
- 4.2 Kondisi Pariwisata di Kabupaten Bintan
- 4.3 Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan

### **BAB 5 PARIWISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN**

- 5.1 Kondisi Eksisting Pariwisata Bahari di Kabupaten Bintan
- 5.2 Wisata Bahari dengan Minat Khusus – Private Island di Kabupaten Bintan
- 5.3 Potensi Rintisan dan Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Bahari di Kabupaten Bintan.
- 5.4 Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata di Kabupaten Bintan Oleh Masyarakat
- 5.5 Kondisi Eksisting dan peluang Pariwisata Bahari berbasis Masyarakat di Kabupaten Bintan.

## **BAB 6 LINGKUNGAN INTERNAL EKSTERNAL**

6.1 Lingkungan Internal

6.2 Lingkungan Eksternal

## **BAB 7 STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN**

7.1 Arah Strategi Pengembangan

7.2. Tahapan pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat.

7.3 Tahapan Tumbuh dan Mandiri di Tahun 2021

7.4 Rekomendasi Kebijakan

## **DAFTAR PUSTAKA**